

**PERAN PEMIMPIN DALAM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
GUNA MENCAPAI *CLEAN GOVERNMENT ORGANIZATION***

Hardi Supeno

Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya

ABSTRACT

Peran pemimpin dalam menegakkan good corporate governance (GCG) sangat penting dalam organisasi pemerintahan. Sudut pandang dari pengelola organisasi pemerintahan harus dirubah apabila menginginkan GCG tercapai dan secara kontinyu diadakan evaluasi, perbaikan, pengembangan ketrampilan dan pengetahuannya. Proses bisnis internal organisasi harus juga terus di awasi, di kontrol, di evaluasi dan ditingkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Alat menuju clean government adalah dengan selalu memegang tinggi komitmen mengenai GCG. Di samping komitmen tinggi terhadap GCG, juga secara kontinyu dilaksanakan audit sumber daya manusia, agar tercapai tujuan organisasi pemerintah bersih disegala bidang.

Belajar dan tumbuh merupakan kewajiban organisasi dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusianya. Dengan meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusianya akan tercipta individu-individu organisasi yang profesionalismenya tinggi, sehingga untuk mencapai tujuan clean government akan mudah di capai

Kata kunci : good corporate governance, proses bisnis internal, belajar dan tumbuh, clean government

1. PENDAHULUAN

Fenomena muncul dimasyarakat, bahwa hampir semua departemen pemerintah belum menunjukkan kinerja yang baik, beberapa media masa dalam negeri banyak mengulas masalah tersebut. Tata kelola yang baik belum diterapkan secara maksimal oleh organisasi public, sehingga terkesan bahwa organisasi pemerintah banyak yang mempunyai kinerja yang buruk (nilai merah).

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan, konsep ini menitik beratkan antara pemilik dan pengelola, dimana pemilik organisasi pemerintah adalah masyarakat, sedangkan pengelola adalah pemerintah. Esensi tata kelola yang baik adalah peningkatan kinerja organisasi pemerintah bagi seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya (investor asing).

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya melalui penerapan tata kelola organisasi yang baik dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, penerapan dan evaluasi (Khomsiyah : 2005 , 24), sedangkan dalam artikel Departemen